

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR KARTASURA SARIBUMI  
TAHUN 2019**



**PT. BPR KARTASURA SARIBUMI  
JL. AHMAD YANI 124 KARTASURA SUKOHARJO  
TELP (0271) 784743,784744, FAX(0271)784745**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR KARTASURA SARIBUMI  
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2019

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR Kartasura Saribumi pada tahun 2019 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

**I. POKOK-POKOK ISI LAPORAN**

Mengacu pada Psl 75 POJK No.4/2015 dan SE OJK No. 5/2015 tentang Penerapan Tata kelola, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

## II. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN

### a. Ruang lingkup Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

##### a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

- Jumlah anggota Direksi 3 orang :

1. Slamet Supomo, SH sebagai Direktur Utama Periode 01 Januari 2019 sd 30 Agustus 2019.

2. Joko Hartanto, SE sebagai Direktur Utama Periode 01 September 2019 sd 31 Desember 2019.

3. Drs. Kuwat Arif Mulyanto sebagai Direktur Pemasaran.

4. Drs. Nyoto Basuki sebagai Direktur YMF Kepatuhan

Masing-masing diangkat sesuai dengan surat persetujuan.

1. Slamet Supomo, SH persetujuan dari OJK nomor S-252/KO.42/2015 tanggal 15-12-2015 dan RUPS nomor 4 tanggal 04-12-2015.

2. Joko Hartanto, SE persetujuan dari OJK nomor Kep 73/KO.0301/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan RUPS nomor 45 tanggal 30-08-2019.

3. Drs. Kuwat Arif Mulyanto persetujuan dari OJK nomor S-199/KO.032/2017 tanggal 17-02-2017 dan RUPS nomor 3 tanggal 03-02-2017.

4. Drs. Nyoto Basuki persetujuan dari OJK nomor S-113/KO.03011/2017 tanggal 25-08-2017 dan RUPS nomor 6 tanggal 09-11-2017.

b. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana surat rekomendasi berikut :

- Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
- Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.

c. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan/merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, secara umum dapat mencapai target target pencapaian laba tercapai 69,51%. Target penurunan tercapai sebesar NPL 4,38%. Biaya efisien tercermin dari rasio BOPO 81,93%.

d. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran BMPK

e. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko sesuai ketentuan, ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-

laporan telah dilaksanakan. Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **1,22** (Sangat Baik).

f. Audit Intern

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang menerapkan fungsi audit intern yang bersifat independent terhadap unit kerja operasional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Bank telah menerapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara independent terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan hasil laporan audit kepada Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

g. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang tranparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat bahwa laporan keuangan Posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT BPR Kartasura Saribumi Tahun Buku 2019 yang telah mendapat persetujuan di dalam RUPS dengan akta nomor 30 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh notaris Aryati Nurul Aini, SH.

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD KAP – OJK : STTD.KAP-168/PM.2/2018 dengan nomor register AP : AP.1326.

h. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis PT BPR Kartasura Saribumi tahun 2019 yang merupakan sasaran baik kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 Tahun) ke depan. Target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya.

Dalam pencapaian target Rencana Bisnis Bank tahun 2019 masih terdapat deviasi. Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1. Edy Sukamto, SE sebagai Komisaris Utama
2. Khanafi, SH sebagai Komisaris

Masing-masing telah mendapat persetujuan OJK dengan surat Nomor S-484/KO.0301/2019 tanggal 28-05-2019 dan RUPS Nomor 30 tanggal 17-05-2019

b. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti

Surat-surat rekomendasi sebagai berikut :

- Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
- Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.

c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR minimal seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Jumat
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapat telah diselenggarakan sebanyak (4 kali), rincian pada butir Risalah rapat **II.(f)** No1 tgl 12 Februari 2019 s.d. No 4 tanggal 03 September 2019.
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas-berkas)
4. Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja a.l. pedoman kerja mengenai:
  - i. Suku Bunga Antar Kantor Nomor 104/SK/DIR/PST/XI.2019 tanggal 27.11.2019.

- ii. Suku Bunga Reward dan Administrasi Simpanan Nomor 076/DIR/KSB/Pst/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- iii. Suku Bunga Reward dan Administrasi Nomor 105/ DIR/KSB/Pst/XI.2019 Tanggal 01.12.2019
- iv. Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Deposito Nomor 110/Pst/ /XII.2019 tanggal 31.12.2019.
- v. SOP Tabungan Siraja Surat Edaran Nomor 355/DIR/Pst/KSB/IV.2019 Tanggal 26.04.2019
- vi. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Surat Edaran Nomor 505/DIR/ KSB/PST/IV.2019 tanggal 13.06.2019.
- vii. Kredit Konsumtif Nomor 014/DIR/Pst/Krd/III.2019 tanggal 29.03.2019.
- viii. Kredit Konsumtif Nomor 072/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- ix. Kredit Modal Kerja Nomor 070/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- x. Kredit Investasi Nomor 071/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- xi. Kredit Cermat Nomor 074/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- xii. Kredit Cash Collateral Nomor 079/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 26.09.2019.
- xiii. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) Nomor 103B/DIR/Pst/XI.2019 tanggal 26.11.2019
- xiv. Suku Bunga Kredit Nomor 075/Dir/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
- xv. Perubahan Nomor Perjanjian Kredit Surat Edaran Nomor 001/DIR/Pst/Ksb/I.2019 tanggal 02.01.2019
- xvi. Pemasaran Kredit surat Edaran Nomor 764/Dir/Pst/Ksb/IX.2019 tanggal 03.09.2019.
- xvii. Cash Ratio Cabang Surat Edaran nomor 1123A/DIR/KSB/Pst/XI.2019 tanggal 25.11.2019.
- xviii. Strukture Organisasi nomor 059/KPTS/DIR/KSB/VII.2019 tanggal 19.07.2019
- xix. Perubahan User ID SLIK Surat Edaran Nomor 481/DIR/Pst/V.2019 tanggal 27.05.2019
- xx. Teknologi Informasi Back Up Data Base Pintech Server Cabang Surat Edaran Nomor 702/Dir/Pst/VIII.2019 tanggal 15.08.2019

- xxi. Labul Apollo OJK Surat Edaran nomor 818/Dir/Pst/IX.2019 tanggal 13.09.2019
  - xxii. Penghapusan Bukuan Kredit Kolektibilitas Macet nomor 081/KPTS/DIR/KSB/X.2019 tanggal 04.10.2019.
  - xxiii. Pedoman Retensi Arsip dan Tata Cara Pemusnahan Arsip nomor 078/DIR/PST/IX.2019 tanggal 30.09.2019.
  - xxiv. Penerapan POJK 33/POJK.03/2017 Surat Edaran nomor 361/SE/DIR/Ksb/IV.2019 tanggal 30.04.2019.
  - xxv. Pedoman Cash Pick Up Service PT BPR Kartasura Saribumi Nomor 007/DIR/PST/I.2019 tanggal 25.01.2019.
  - xxvi. Penunjukan Penanggung Jawab Fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nomor 109/DIR/PST/XII.2019 tanggal 31.12.2019.
  - xxvii. Tim Identifikasi PT BPR Kartasura Saribumi nomor 065/DIR/PST/VIII.2013 tanggal 16.08.2019.
  - xxviii. Penetapan Besarnya Uang Makan nomor 069/KPTS/DIR/KSB/IX.2019 tanggal 02.09.2019.
  - xxix. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Surat Edaran Nomor 354/DIR/PST/KSB/IV.2019 tanggal 26.04.2019.
5. Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen kegiatan tersebut antara lain Memo kepada Direksi:
- Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
  - Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.No 006/DEKOM/BPR/KSB/XII.2018 tanggal 11 Desember 2018

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

**Susunan Pengurus dan Pemegang Saham**

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

**PENGURUS**

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Edi Sukamto, SE
Komisaris	Khanafi, SH
Direktur Utama	Slamet Supomo, SH (Periode 01 Januari 2019 sd 30 Agustus 2019)
Direktur Utama	Joko Hartanto, SE (Periode 01 September 2019 sd 31 Desember 2019)
Direktur Pemasaran	Drs. Kuwat Arif Mulyanto
Direktur YMF Kepatuhan	Drs. Nyoto Basuki

**PEMEGANG SAHAM****1 = Rp1.000**

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. DANA PENSIUN BPD JATENG	17.813.000	65,97 %
2. KOPERASI YAKEKAR BPD JATENG	3.500.000	12,96 %
3. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN PENSIUNAN (YAKEKAR) BPD JATENG	3.280.000	12,16 %
4. YAYASAN PERUMAHAN (YAPERUM) BPD JATENG	1.607.000	5,95 %
5. YAYASAN PENDIDIKAN (YAPENDIK) BPD JATENG	800.000	2,96 %
TOTAL	27.000.000	100 %

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di PT BPR Kartasura Saribumi

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Slamet Supomo, SH/ Direktur Utama	Nihil	Nihil
Joko Hartanto, SE/ Direktur Utama	Nihil	Nihil
Kuwat Arif M/ Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil
Nyoto Basuki/ Direktur YMF Kepatuhan	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Slamet Supomo, SH/ Direktur Utama	Nihil	Nihil
Joko Hartanto, SE/ Direktur Utama	Nihil	Nihil
Kuwat Arif M/ Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil
Nyoto Basuki/ Direktur YMF kepatuhan	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilikan saham	Hubungan keluarga/keuangan
Slamet Supomo, SH/ Direktur Utama	Nihil	Nihil
Joko Hartanto, SE/	Nihil	Nihil

Direktur Utama		
Drs. Kuwat Arif M /Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil
Nyoto Basuki /Direktur YMF Kepatuhan	Nihil	Nihil

- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Di PT BPR Kartasura Saribumi

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Edy Sukamto/ Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Khanafi/Komisaris	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Di BPR lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Edy Sukamto/ Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Khanafi/Komisaris	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Di Perusahaan lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Edy Sukamto/ Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Khanafi/Komisaris	Nihil	Nihil

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

1. Berupa uang

Jenis Remunasi	DIREKSI				KOMISARIS	
	Slamet Supomo, SH	Joko Hartanto, SE	Drs Kuwat Arif M	Drs Nyoto Basuki	Edy Sukamto, SE	Khanafi, SH
Gaji /Honor	195.462.400	97.731.200	237.361.440	234.554.880	175.916.160	140.732.928
Tunjangan Kemahalan	-	-	-	-	-	-
Tentem	74.105.791	37.052.895	88.926.949	88.926.949	66.695.212	53.356.169
Kopensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Tunjangan Perumahan	8.750.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
Tunjangan Kesehatan	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	4.000.000	4.000.000
jumlah Gaji Seluruhnya	<b>285.318.191</b>	<b>149.784.095</b>	<b>348.288.389</b>	<b>345.481.829</b>	<b>246.611.372</b>	<b>198.089.097</b>

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis Remunasi	DIREKSI				KOMISARIS	
	Slamet Supomo, SH	Joko Hartanto, SE	Drs Kuwat Arif M	Drs Nyoto Basuki	Edy Sukamto, SE	Khanafi, SH
Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tranportasi	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Tidak Ada	Mobil Dinas	Tidak Ada	Tidak Ada
Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS

e. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

Gaji Pegawai Tertinggi	Rp9.221.762	81.04%
Gaji Pegawai Terendah	Rp2.158.071	18.96 %

2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

Gaji Direksi Tertinggi	Rp24.432.800	55.56 %
Gaji Direksi Terendah	Rp19.532.800	44.44 %

3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

Gaji Komisaris Tertinggi	Rp14.659.680	55.56
Gaji Komisaris Terendah	Rp11.727.744	44.44

4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi	Rp24.432.800	62.50 %
Gaji Komisaris Tertinggi	Rp14.659.680	37.50 %

5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi	Rp 24.432.800	72.60 %
Gaji Pegawai Tertinggi	Rp9.221.762	27.40 %

Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

- 1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun; Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun 2019
- 2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi; Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali, sedangkan yang melalui teknologi informasi belum pernah.
- 3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris

4) Topik atau materi rapat;

No	Tanggal	Materi Rapat
1	18 Februari 2019	Pencapaian Operasional Bulan Januari 2019, Pelaksanaan pelatihan APU – PPT.
2	16 Mei 2019	Pencapaian Operasional Bulan April 2019, persiapan Halal Bihalal !440 H, serta Likuiditas Menjelang Lebaran.
3	05 Juli	Manajemen Risiko laporan Profil Risiko, Undian Siraja tahun 2019
4	03 September	Pencapaian Operasional sampai dengan Agustus 2019 terutama perkembangan Kredit

f. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

- 1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan; tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses.
- 2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR; tidak ada kejadian fraud yang telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- 3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.
- 4) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

g. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

i. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Peduli Tsunami Sunda	1.000.000
2	Sumbangan Mushola Asy-syukur	500.000
3	Bingkisan Lebaran	6.197.750
4	Kambing qurban Kantor Pusat	6.000.000
5	Kambing qurban 13 cabang	38.385.000

## PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR Kartasura Saribumi selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

KOMISARIS UTAMA



(EDY SUKAMTO, SE)

Kartasura, 30 April 2020

PT Bank Perkreditan Rakyat

Kartasura Saribumi

DIREKTUR UTAMA



(JOKO HARTANTO, SE)

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Kartasura Saribumi

Posisi : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,22	Sangat Baik
Analisis	
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.</p>	

Kartasura, 30 April 2020

PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Kartasura Saribumi

DIREKTUR UTAMA



(JOKO HARTANTO, SE)

KOMISARIS UTAMA



(EDY SUKAMTO, SE)